

**PENGARUH SOSIALISASI TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH
DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILU DI KABUPATEN
TOBA SAMOSIR**

Manoghontua Gultom¹, Marto Silalahi², Galumbang Hutagalung³, Jhonson A Marbun⁴

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Simalungun

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sosialisasi terhadap partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di Kabupaten Toba Samosir. Keberhasilan pemilihan umum membutuhkan dukungan semua pemangku keberhasilan pemilihan umum. Populasi penelitian ini adalah penduduk kabupaten Toba Samosir yang terdaftar pada DPT 2014 yang berjumlah 127.920 jiwa. Dengan menggunakan rumus penarikan sampel, maka sampel penelitian sebesar 125 orang. Penelitian ini menggunakan regresi sederhana, metode analisis dan pengujian hipotesis. Penelitian ini memberikan informasi bahwa sosialisasi memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan data hasil kuesioner dan pengolahannya menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh sosialisasi terhadap tingkat partisipasi pemilih sebesar 0,448 atau 44,8 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan umum di Kabupaten Toba Samosir. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir bahwa tingkat partisipasi pemilih membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan KPU meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait.

Kata Kunci : Sosialisasi, Tingkat Partisipasi Pemilih.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the socialization of voter participation in general elections in Toba Samosir Regency. The success of general elections requires the support of all stakeholders in the success of general elections. The population of this study were residents of Toba Samosir district who were registered on the 2014 DPT, totaling 127,920 people. By using the sampling formula, the research sample is 125 people. This study uses simple regression, analysis methods and hypothesis testing. This study provides information that socialization has an influence on the level of voter participation. Data processing is done by collecting data from the results of questionnaires and processing them using SPSS. From the research results it is known that the effect of socialization on the level of voter turnout is 0.448 or 44.8%. So it can be concluded that socialization has a significant effect on the level of voter participation in general elections in Toba Samosir Regency. This research contributes ideas and suggestions to the Toba Samosir Regency Government that the level of voter participation requires full support from the Toba Samosir Regency Government, the community actively participates in general elections and the KPU improves communication and outreach to various related parties.

Keywords: Socialization, Voter Participation Level.

PENDAHULUAN

Keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah menjadi modal utama bagi keberhasilan pemerintah mensukseskan visi dan misi daerah.

Keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah terlihat dari keseluruhan proses program dan kegiatan itu sendiri. Dalam konteks otonomi daerah, partisipasi masyarakat menjadi barometer keberhasilan pemerintahan menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Partisipasi masyarakat misalnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah, keterlibatan masyarakat akan memiliki sumbangan yang besar dan berarti.

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dukungan atau partisipasi masyarakat. Dalam pemilihan berbagai kebijakan pemerintahan membutuhkan dukungan masyarakat karena masyarakat merupakan objek dari pembangunan daerah itu sendiri. Sebagai contoh, ketersediaan infrastruktur jalan desa, jalan kecamatan dan jalan kabupaten/kota memiliki hubungan dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat akan terlihat dalam proses musyawarah pembangunan daerah yang terjadi pada tingkatan desa/kelurahan, tingkatan kecamatan ataupun pada tingkatan kabupaten/kota. Komunikasi sinergis antara pemerintahan dengan masyarakat akan tergambar dengan jelas dan lengkap dalam penentuan skala prioritas pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Keberhasilan berbagai kebijakan pemerintahan akan semakin mudah tercapai bila masyarakat mendukung keseluruhan kebijakan pemerintah itu mulai dari proses perencanaan, penyelenggaraan atau pelaksanaan ataupun proses pengawasan kebijakan itu sendiri.

Kepercayaan masyarakat merupakan elemen utama dari pelaksanaan dukungan masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah. Tingkatan kepercayaan masyarakat merupakan agregat kepercayaan masyarakat atas berbagai program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan. Seperti kata orang bijak bahwa sekali dipercaya maka tetap akan dipercaya. Kepercayaan masyarakat atas kebijakan beras miskin sebagai contoh, akan menghasilkan tingkat legitimasi keberadaan kebijakan beras miskin itu.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah, pemilihan wakil rakyat maupu pemilihan presiden sangat membutuhkan keberadaan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat menentukan arah dan haluan kebijakan yang akan ditentukan. Kontribusi dukungan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah, misalnya akan jelas terlihat bahwa sumbangan atau dukungan politik masyarakat menjadi modal utama memperoleh suara terbanyak. Hal tersebut akan berhubungan dengan penentuan kemenangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi dampak positif mensosialisasikan berbagai kebijakan daerah. Sosialisasi berbagai kebijakan akan menghasilkan dukungan besar atau antipati dari masyarakat. Keberhasilan kebijakan daerah sangat tergantung kepada mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat atau kepada perwakilan masyarakat.

Pertumbuhan kebutuhan masyarakat ataupun pertumbuhan jumlah penduduk membutuhkan berbagai kebijakan daerah karena dinamika tersebut membutuhkan sumber dana, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya telekomunikasi, media elektronik, media massa, dan televisi dan sebagainya memberikan sumbangan besar dalam mensosialisasikan berbagai kegiatan pemerintahan daerah. Mengedukasi masyarakat melalui media elektronik, media massa, televisi dan sebagainya akan mempermudah dan mempercepat menyerapan masyarakat atas kegiatan pemerintahan daerah tersebut.

Menedukasi atau mendidik masyarakat atas berbagai pilihan kebijakan yang diambil akan menambah kualitas kebijakan yang diambil tersebut. Pilihan masyarakat akan melewati seleksi alternatif pilihan yang diberikan pemerintahan daerah. Sebagai contohnya, pilihan masyarakat atas beberapa calon kepala daerah akan berkualitas bila partisipasi politik masyarakat didasarkan informasi yang jelas dan lengkap atas calon kepala daerah yang disediakan penyelenggara pemilihan kepala daerah. Kelengkapan dan kejelasan informasi tersebut dapat berupa kualitas personal calon yang ada, visi dan misi calon yang ada, dan sebagainya. Kelengkapan dan kejelasan informasi tersebut menjadi bahan kriteria masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan modal besar yang harus diperhatikan. Dalam menentukan pilihan calon kepala daerah sebagai contohnya, dukungan politik masyarakat menjadi sarana kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kontrol politik masyarakat dapat dilihat dari aktivitas masyarakat dalam berbagai proses politik yang dilakukan. Sebagai contohnya adalah tingkat kehadiran masyarakat dalam pemilihan umum merupakan bagian integral dari kontrol politik masyarakat atas proses penyelenggaraan pemilihan umum yang terjadi. Pemangku kepentingan pemilihan umum harus memaklumi atau menyadari bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemilihan umum itu sendiri. Seperti kata masyarakat umum bahwa bila suatu acara pernikahan sedikit yang hadir, merupakan pertanda ada sesuatu yang harus diperbaiki.

Apakah menu makanan yang tidak baik, apakah perilaku kedua mempelai tidak baik, apakah perilaku kedua keluarga besar tidak baik, apakah lokasi pernikahan terlalu jauh, apakah waktu yang tidak tepat, apakah karena ada hujan dan sebagainya. Bila pandangan masyarakat tersebut dipakai pada kegiatan pemilihan umum, maka banyak faktor yang harus diperhatikan agar pemilihan umum itu dapat berjalan dengan maksimal. Dengan demikian, pemangku pemilihan umum dituntut melakukan berbagai aktivitas dengan mengedepankan manajemen pemilihan umum dengan maksimal baik pada tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan maupun pada tahapan pengawasan. Pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Toba Samosir, terdapat 127.920 pemilih (pemilih perempuan = 65.504 orang ; pemilih laki laki = 62.416 orang) dengan 501 tempat pemungutan suara (tps) (sumber : berita acara rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Toba Samosir Nomor : 2404/BA/002.434801/XI/2013 tanggal 30 November 2013, buku laporan penyelenggaraan pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di kabupaten Toba Samosir, hlm 63.). Kabupaten Toba Samosir memiliki enam belas kecamatan.

Partisipasi politik masyarakat akan terlihat dari kegiatan menjadi relawan mensukseskan pemilihan umum, mencek kepesertaan dalam pemilihan, kehadiran pada saat pemilihan, memberikan hak suara pada saat pemilihan, memberikan saran pendapat bila diminta tanggapan atas pelaksanaan pemilihan, dan sebagainya. Partisipasi politik masyarakat merupakan dasar legitimasi terpilihnya suatu calon kepala daerah atau cara anggota perwakilan rakyat.

Meningkatkan dukungan atau sumbangan masyarakat menjadi pusat perhatian dari pemangku keberhasilan pemilihan umum. Bagi calon kepala daerah atau calon anggota dewan, diartikan bahwa keberadaan dukungan masyarakat menjadi modal sosial dan politik dalam keberhasilan meraih suara sebanyak mungkin. Bagi pemangku pemilihan umum,

diartikan bahwa sumbangan masyarakat menjadi legitimasi keberadaan pemilihan umum dan indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum.

Mensosialisasikan berbagai kegiatan penyelenggara pemilihan umum merupakan barometer keberhasilan pemilihan umum itu sendiri. Ketidaktahuan masyarakat memberikan dampak bagi kehadiran masyarakat pada pemilihan, kepercayaan masyarakat pada calon pada pemilihan, keberhasilan pemilihan dan sebagainya. Penyelenggara pemilihan umum diharapkan melaksanakan tahapan dan jadwal pemilihan sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan, yaitu Tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan tahapan penyelesaian pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan bagian integral dari keberhasilan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan modal utama bagi pembentukan pemerintahan dan pengangkatan calon pemimpin daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tugas semua pemangku keberhasilan pemilihan umum. Karena itu seluruh pemangku keberhasilan pemilihan umum harus melakukan tugas dan fungsi masing masing dengan maksimal.

Fenomena partisipasi politik masyarakat menjadi menarik perhatian seluruh pemangku keberhasilan pemilihan umum. Partisipasi politik masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembentukan pemerintahan dan legitimasi terpilihnya calon pemimpin daerah. Partisipasi politik masyarakat memiliki hubungan sinergis dengan sosialisasi berbagai kegiatan yang dilakukan calon pemimpin daerah, penyelenggara pemilihan umum, relawan calon pemimpin dan sebagainya.

Keberdayaan masyarakat dalam pemilihan umum menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Untuk membahas dan menganalisa hubungan sosialisasi aktivitas politik dengan partisipasi politik yang dilakukan masyarakat, sangat dibutuhkan dukungan ilmiah. Dalam menganalisa hubungan pengaruh tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh sosialisasi terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu di Kabupaten Toba Samosir.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penjelasan yang berhubungan sosialisasi politik dan tingkat partisipasi politik yang berlangsung pada pemilihan umum di Kabupaten Toba Samosir. Untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel penelitian maka dilakukan penelitian penjelasan (explanatory research, Singarimbun, 1995). Penggumpulan data dilakukan dengan Penyebaran daftar pertanyaan (Kuesioner), Wawancara, Studi Dokumen. Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, maka dilakukan tabulasi dan rekapitulasi data. Data tersebut dianalisa serta dibahas sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang ada. Sedangkan pengolahan data dan proses pengujian statistik diolah dengan menggunakan program SPSS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Data Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil analisis deskriptif, menunjukkan nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum), rata-rata (mean) dan standar deviasi dari setiap variabel yang diteliti untuk hipotesis, baik itu variabel bebas yaitu Sosialisasi dan variabel

terikat yaitu Tingkat Partisipasi Masyarakat. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Analisis Deskripsi Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi	125	11	35	33,36	5,781
Tingkat Partisipasi	125	15	42	31,94	4,741
Valid N (listwise)	125				

Sumber : Hasil Penelitian 2016 (data diolah)

Dari Tabel 1. di atas diperoleh informasi bahwa rata-rata sosialisasi sebesar 33,36 dan memiliki nilai tertinggi sebesar 35 dan nilai terendah sebesar 11 sedangkan standar deviasinya sebesar 5,781. Masyarakat memberikan tanggapan tertinggi sebesar 35 atas instrumen pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Rata-rata variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat sebesar 31,94 nilai tertinggi sebesar 42 dan nilai terendah sebesar 15 sedangkan stándar deviasinya adalah 4,741. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum memiliki sumbangan dan peranan besar sehingga 42 orang masyarakat memberikan tanggapan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model, yaitu variasi variabel bebas yaitu sosialisasi dalam menerangkan variasi variabel terikatnya yaitu tingkat partisipasi Masyarakat masyarakat petani di Kabupaten Tobasa. Nilai koefisien determinasi R² dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Koefisien Determinan (Uji R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.670 ^a	.448	.444	3.881	.448	100.016	1	123	.000

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah)

Dari tabel diatas, diperoleh informasi bahwa Nilai R² yang diperoleh adalah sebesar 0,448 atau 44,8% yang menunjukkan kemampuan variabel Sosialisasi dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Tobasa sebesar 44,8%, sedangkan sisanya sebesar 55,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini, misalnya pendidikan masyarakat, program pemerintah, keterlibatan tokoh agama, tokoh pemuda dan sebagainya. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui optimalisasi sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilihan umum. Namun demikian kegiatan yang dilakukan tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagai masih dapat mempengaruhi masyarakat untuk mensukseskan pemilihan umum.

Uji t

Berdasarkan Tabel 3 dibawah ini, diperoleh informasi bahwa nilai konstanta adalah sebesar 12,679 dan nilai koefisien masing-masing variabel adalah sebesar 0,588 untuk X. Maka model regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 12,679 + 0,588 X$$

Dimana :

Y = Sosialisasi

X₁ = Tingkat Partisipasi Masyarakat.

Tabel 3. Uji Hipotesis Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.679	1.998		6.345	.000		
SOSIALISASI	.588	.059	.670	10.001	.000	1.000	1.000

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah)

Dari Tabel 3. di atas ini diperoleh informasi bahwa hasil Nilai t_{hitung} untuk variabel Sosialisasi (6,345) lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} (2,92) atau nilai sig (0,000) lebih kecil dari alpha (0,025). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka H_0 ditolak dan H_1 diterima untuk variabel Sosialisasi, dengan demikian maka variabel Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Kabupaten Tobasa dengan demikian Sosialisasi sangat berperan dalam meningkatkan Tingkat partisipasi masyarakat memilih di Kabupaten Tobasa.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas adalah sosialisasi dan variabel terikat adalah partisipasi pemilih. Variabel Tingkat partisipasi pemilih dapat dijelaskan oleh variabel sosial sebesar 30,20 % dan sisanya sebesar 69,80 % dijelaskan faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini.

Kemampuan mensukseskan pemilihan umum tidak semata tanggungjawab penyelenggara pemilihan umum. Pemilihan umum adalah salah satu instrumen penting sistem demokratisasi. Keberhasilan pemilihan umum akan membuahkan kehidupan sistem demokrasi yang mantap. Oleh karena itu, keberhasilan pemilihan umum merupakan tanggungjawab pemangku keberhasilan pemilihan umum. Pemerintah (baik pusat maupun daerah) memiliki tanggungjawab sesuai dengan norma perundangan, masyarakat bertanggungjawab memberikan hak suara konstitusionalnya, KPU bertanggungjawab menyelenggarakan pemilihan umum dan dunia usaha bertanggungjawab sesuai dengan hak dan kewajiban politiknya. Keberhasilan pemerintahan dan pembangunan daerah berhubungan dengan partisipasi seluruh pemangku kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari sumbangan masyarakat dalam program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada tingkatan desa/kelurahan, sumbangan masyarakat terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, kebersihan lingkungan, membangun jalan setapak dan sebagainya. Partisipasi masyarakat menjadi indikator keberhasilan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pada kegiatan demokrasi baik pemilihan kepala desa, kepala daerah, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, partisipasi masyarakat tergambar dari seberapa besar sumbangan suara masyarakat. Program dan kegiatan demokrasi diatas sangat ditentukan kinerja penyelenggara pemilihan dan partisipasi masyarakat. Tidak dapat dibayangkan bila tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan terselenggara pemilihan dengan berkualitas. Profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dari program dan kegiatan penyelenggara pemilihan menjadi pertarungan besar atas keberhasilan pemilihan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi membutuhkan keberdayaan masyarakat atas kandidat yang akan dipilih, maksud dan tujuan pemilihan, kegunaan pemilihan, tempat dan waktu

pemilihan, teknik atau cara menjoblos, dan sebagainya. Memberdayakan masyarakat pemilih menjadi grand strategi yang perlu digunakan penyelenggara pemilihan.

Untuk mengoperasionalkan program dan kegiatan memberdayakan masyarakat pemilih membutuhkan berbagai kebutuhan diantaranya adalah jumlah pemilih yang berkualitas. Pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kabupaten Toba Samosir, terdapat 127.920 pemilih (pemilih perempuan = 65.504 orang ; pemilih laki laki = 62.416 orang) dengan 501 tempat pemunggutan suara (tps) (sumber : berita acara rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Toba Samosir Nomor : 2404/BA/002.434801/XI/2013 tanggal 30 November 2013, buku laporan penyelenggaraan pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di kabupaten Toba Samosir, hlm 63.) Data pemilih sebesar 127.920 pemilih itu berada di enam belas kecamatan se Kabupaten Toba Samosir. Profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggara menjadi pertarungan besar dalam keberhasilan pemilihan umum yang dilaksanakan.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum merupakan keberhasilan kehidupan demokrasi yang diselenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu, kontribusi dan sumbangan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum itu. Dukungan pemerintah daerah dapat dilihat dari ketersediaan dana yang diberikan, data yang diberikan, dan dukungan lainnya. Para ahli berpendapat bahwa kehidupan demokrasi menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi elemen utama dalam keberhasilan pemilihan itu sendiri. Walaupun ada anggapan bahwa memilih adalah hak politik masyarakat, namun kenyataan setiap pesta demokrasi atau pemilihan akan terlihat antusiasme masyarakat untuk hadir dalam tempat pemilihan suara. Perlu dipikirkan ulang oleh komponen bangsa Indonesia, bahwa pemilihan umum atau pesta demokrasi menjadi kewajiban politik warga negara atau masyarakat. Sebagai pemegang kedaulatan, warga negara atau masyarakat perlu dilibatkan dengan maksimal sehingga mutu demokrasi semakin lama semakin meningkat.

Untuk memahami perilaku masyarakat menentukan pilihan politiknya dapat diamati dari pendekatan struktural yaitu memilih berdasarkan struktural yang terdapat dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal masyarakat. Dalam lingkungan internal masyarakat artinya bahwa masyarakat memiliki sistem nilai baik nilai sosial, nilai budaya, nilai ideologi, nilai kepercayaan dan nilai lainnya. Kegiatan memilih yang dilakukan masyarakat berhubungan dengan pemahaman masyarakat atas serangkaian nilai yang dimiliki masyarakat atas berbagai pilihan yang disediakan penyelenggara pemilih. Terkadang pandangan di atas dianggap bahwa sistem nilai yang dimiliki masyarakat tidak berada pada masyarakat tradisional, masyarakat yang tinggal di desa, masyarakat yang miskin dan sebagainya. Namun hampir dapat dipastikan bahwa anggapan itu masih dapat diperdebatkan karena masyarakat memiliki kearifan lokal yang bersendikan sistem nilai tersendiri. Untuk memahami perilaku masyarakat menentukan pilihan politiknya dapat diamati dari pendekatan sosiologi yaitu memilih berdasarkan masyarakat dipengaruhi faktor faktor pengaruh sehingga masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada konstitestan tertentu. Faktor tersebut dapat berupa demografi, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, tingkatan penghasilan, dan sebagainya. Meningkatkan pemahaman siapa dan apa pemilihan itu, menjadi sangat krusial dalam proses panjang mencerdaskan masyarakat pemilih. Memilih dan atau tidak memilih menjadi satu titik krusial dan genting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilihan dan pada akhirnya keberhasilan kehidupan demokrasi dalam suatu negara.

Untuk memahami perilaku masyarakat menentukan pilihan politiknya dapat diamati dari pendekatan ekologis yaitu memilih berdasarkan suatu daerah atau wilayah yang menghubungkan masyarakat dengan konstestan. Sistem nilai yang dimiliki masyarakat bersifat subjektif dan objektif. Subjektivitas pilihan masyarakat sangat tergantung faktor internal atau hubungan emosional tertentu. Memilih satu konstestan adalah hak politik masyarakat pemilih. Pada kondisi saat ini, faktor wilayah atau daerah masih memiliki peranan dan sumbangan dalam mempengaruhi perilaku memilih. Walaupun persentasenya adalah sedikit atau kecil. Namun demikian, adalah menjadi krusial dan genting bila dua pasangan konstestan memiliki faktor yang sama selain faktor daerah atau wilayah.

Untuk memahami perilaku masyarakat menentukan pilihan politiknya dapat diamati dari pendekatan psikologi sosial yaitu memilih berdasarkan kedekatan hubungan tertentu kepada konstestan tertentu. Hubungan emosional pemilih dengan konstestan tertentu didasarkan pilihan subjektif pemilih. Sistem nilai yang diemban konstestan memiliki kesamaan sistem nilai yang dimiliki pemilih hubungan emosional pemilih dan konstestan memiliki interval waktu yang panjang dan tidak sekali jadi. Hampir dapat dipastikan bahwa sistem nilai yang dimiliki pemilih tidak terpengaruh faktor yang bersifat instan dan bersifat transaksional.

Untuk memahami perilaku masyarakat menentukan pilihan politiknya dapat diamati dari pendekatan perilaku rasional yaitu memilih berdasarkan perilaku rasional yang bersendikan untung rugi. Pada tingkatan tertentu bahwa pemilih yang tidak memiliki sistem nilai yang baku, akan sangat mudah terpengaruh faktor untung rugi tersebut. Terkadang sebagian orang beranggapan bahwa landasan berpikir dari pemilih yang berdasarkan kepada perilaku rasional adalah semata mata untung rugi atau singkatnya adalah memperoleh uang. Mungkin dapat dielaborasi bahwa pemilih yang berdasarkan perilaku rasional adalah pemilih yang telah memiliki tingkat pemahaman yang lengkap atas konstestan, subjek dan objek demokrasi, mekanisme dan prosedural penyelenggaraan pemilihan serta maksud dan tujuan serta kegunaan pemilihan itu.

Pandangan yang miring atau sinis bahwa pemilih dengan perilaku rasional cenderung mencari keuntungan sesaat. Membuktikan pandangan miring tersebut harus dibuktikan dengan aksi nyata bahwa transaksional tidak didasarkan kepada material atau uang tapi dengan transaksi jual beli visi dan misi konstestan. Kehidupan demokrasi menjadi kata kunci kehidupan bernegara (atau berpemerintahan). Kehidupan bernegara (berpemerintahan) harus mengikuti norma perundangan yang berlaku. Demikian juga dengan penyelenggaraan pemilihan umum harus didasarkan kepada norma perundangan (asas legalitas). Hampir dapat dipastikan bahwa norma perundangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak memperoleh transaksi material (atau uang). Menegakkan norma perundangan dalam meniadakan transaksi material menjadi tugas semua pemangku kepentingan dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan salah satu indikator keberhasilan kehidupan demokrasi dalam suatu pemerintahan (negara). Mensukseskan kehidupan demokrasi membutuhkan dukungan atau partisipasi semua komponen bangsa dan negara. Suprastruktur politik dan infrastruktur politik menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi suatu pemerintahan (negara). Konstestan baik peserta pemilihan umum (individu dan partai politik) maupun pasangan calon (kepala daerah/wakil kepala daerah dan presiden/wakil presiden) menjadi agen perubahan politik berbangsa dan bernegara.

Keberdayaan konstestan memberikan sumbangan yang besar dan berarti bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum. Keberdayaan konstestan mengandung makna bahwa memperkuat dan memperkokoh kehidupan demokrasi melalui agen perubahan adalah salah satu sumber daya yang dimiliki konstestan tersebut. Ibarat kata orang bijak bahwa kerja adalah ibadah maka konstestan melakukan pekerjaannya dengan sebaik baiknya dan selalu mengingat bahwa pekerjaan yang dilakukannya adalah ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memperkuat dan memperkokoh sumbangan dan kontribusi konstestan dalam pemilihan umum menjadi modal sosial budaya yang harus terus menerus diperjuangkan semua pihak. Bila hal itu terjadi, maka visi dan misi konstestan akan selalu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan baik dan benar serta tidak melanggar norma perundangan yang berlaku. Penajaman visi dan misi konstestan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dari konstestan menjadi sarana penting bagi penajaman visi dan misi serta kegiatan yang menjadi andalannya. Profesionalitas konstestan membuat visi dan misi perjuangannya dapat diukur dari kinerja konstestan baik pada tingkatan organisasional (misalnya aktif menyuarakan kebutuhan rakyat dalam rapat atau sidang) maupun tingkatan individualitas (misalnya aktif mendengar suara masyarakat di lapangan). Akuntabilitas konstestan menjadi sarana mengukur kinerja yang dilakukan dengan cara mempertanggungjawabkan secara administratif kepada organisasi (partai politiknya, lembaga perwakilan rakyat) dan mempertanggungjawabkan secara sosial budaya kepada konstituen atau masyarakat yang diwakilinya serta mempertanggungjawabkan secara hukum atas penggunaan keuangan negara.

Transparansi kegiatan yang dilakukan konstestan menjadi sarana mengukur kinerja konstestan. Hal itu mengandung makna bahwa keseluruhan kegiatan konstestan baik secara organisasional maupun secara individual harus dapat diakses dan dilihat secara gamlang oleh semua konstituennya dan semua pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan konstestan diharapkan dapat dimasukkan kedalam dunia elektronik sehingga semua pemangku kepentingan dapat mengakses dan melihat perkembangan pekerjaan konstestan tersebut. Memang harus diakui bahwa keseluruhan kegiatan konstestan tidak harus diperlihatkan atau dipertontonkan karena sebagian kegiatan tersebut bersifat privat (misalnya kehidupan suami istri, dan sebagainya).

Untuk keseluruhan kegiatan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, dan kepala/wakil kepala pemerintahan (baik pusat maupun daerah) sejatinya harus dapat dilihat dan atau diakses masyarakat sehingga masyarakat memiliki peranan dalam memberikan sumbang saran perbaikan dan sumbang saran penguatan. Pada tingkatan organisasional, keseluruhan kegiatan konstestan memiliki mekanisme dan prosedural mempertanggungjawabkan secara administrasi (termasuk keuangan). Mekanisme pertanggungjawaban secara sosial budaya tidak memiliki mekanisme dan prosedural yang baku karena itu adalah wajar bila konstestan mempertanggungjawabkan kepada konstituen secara berkala (misalnya sewaktu masa reses, sewaktu peninjauan lapangan, sewaktu public hearing dan sebagainya). Mempertanggungjawabkan secara sosial budaya ini mengharuskan kreativitas dan daya kreasi konstestan sehingga masyarakat merasakan keterwakilan mereka dalam posisi yang dimiliki konstestan tersebut.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum merupakan output atau hasil pekerjaan penyelenggara secara efektif dan efisien. Efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilihat dari keberhasilan pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan norma perundangan (undang undang pemilu, peraturan teknis pelaksana lainnya). Jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2014 Kabupaten Toba Samosir didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan KPU nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2014. Pada peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2014 tersebut dijelaskan bahwa jadwal penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Pada tahapan persiapan tercatat kegiatan penataan organisasi yaitu : 1) kegiatan pendaftaran pemantauan dan pemanfaatan, 2) kegiatan pembentukan badan penyelenggara, 4) seleksi anggota kpu provinsi dan kabupaten/kota, 5) kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi dan bimbingan teknis di setiap tingkatan, 6) kegiatan sosialisasi, publikasi, dan pendidikan pemilih, 7) kegiatan pengelolaan data dan informasi dan 8) kegiatan logistik.

Pada umumnya dalam organisasi dikenal kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan. Seperti kegiatan organisasi tersebut, dalam organisasi penyelenggara pemilihan umum atau KPU dikenal juga kegiatan tersebut. Hakekat pemilihan umum adalah memilih wakil rakyat yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penguatan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi semulia itu, maka adalah wajar bila KPU mempersiapkan dengan sematang mungkin sehingga kesiapan sumber daya man, money, material, metode dan minute mendukung dan memperlancar kegiatan pemilihan umum itu sendiri. Kesiapan sumber daya manusia diartikan bahwa staf administrasi KPU, komisioner KPU dan sebagainya harus direncanakan selengkap mungkin sehingga potensi kesalahan atau kegagalan menjadi semakin kecil.

Pada tahapan penyelenggaraan pemilu, terdapat beberapa kegiatan, yaitu : 1) perencanaan program dan anggaran ; 2) penyusunan peraturan KPU ; 3) pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu ; 4) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ; 5) penyusunan daftar pemilih di luar negeri ; 6) Penataan dan penetapan daerah pemilihan ; 7) Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ; 8) Kampanye ; 9) Masa tenang ; 10) Pemunggutan dan penghitungan suara ; 11) Rekapitulasi hasil perhitungan suara ; 12) Penetapan hasil pemilu secara nasional ; 13) Penetapan partai politik memenuhi amang ; 14) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih ; 15) Peresmian keanggotaan dan 16) pengucapan sumpah/janji.

Pada tahapan penyelenggaran terdapat enam belas kegiatan yang harus dipersiapkan KPU. Keenam belas kegiatan tersebut harus direncanakan sematang mungkin sehingga potensi kegagalan atau kesalahan dapat diatas dengan baik. Seperti kata orang bijak bahwa merencanakan sesuatu dengan baik akan memberikan hasil yang baik. Dengan demikian, bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum merencanakan metode, prosedural dan mekanisme kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan umum itu sendiri. Pada tahapan penyelesaian pemilihan umum, terdapat beberapa kegiatan, yaitu : 1) Perselisihan hasil pemilu ; 2) Penyusunan Laporan penyelenggaraan pemilu ; 3) Penyusunan dokumentasi ; 4)

Pengelolaan arsip ; 5) Pembubaran badan penyelenggara ad hoc ; 6) Penyusunan laporan keuangan.

Pada tahapan penyelesaian pemilu terdapat enam kegiatan yang berhubungan dengan perselisihan hasil pemilu sampai dengan kegiatan penyusunan laporan keuangan dari kegiatan pemilihan umum itu sendiri. Memang harus diakui bahwa akuntabilitas penggunaan uang menjadi titik krusial yang harus dibuat KPU. Keuangan yang digunakan KPU bersumber dari keuangan negara karena itu adalah wajar dan pantas bila pertanggungjawaban itu menjadi suatu kebutuhan organisasi.

Sumber keuangan penyelenggaraan pemilihan umum harus dipertanggungjawabkan secara benar sehingga pemerintahan yang demokratis adalah benar kebutuhan masyarakat atau kebutuhan rakyat Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan menjadi modal sosial budaya yang perlu dikelola dengan baik. Mempertanggungjawabkan keuangan penyelenggaraan pemilihan adalah bagian tidak terpisahkan dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Seperti dalam organisasi pada umumnya, dikenal istilah money follow function, maka dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah menjadi suatu kebutuhan organisasi atas ketersediaan sumber keuangan. Pada organisasi KPU, sumber keuangan berasal dari APBD/APBN. Dari keseluruhan tahapan dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum itu membutuhkan sumber keuangan karena itu dapat dikatakan bahwa sistem demokrasi membutuhkan dana yang besar. Begitu besarnya dana untuk mewujudkan sistem demokrasi tersebut maka tugas dan fungsi semua pemangku kepentingan (komponen bangsa dan masyarakat) membuatnya berhasil dan berkualitas.

Kehadiran sistem demokrasi menjadi suatu kebutuhan pemerintah dan negara melalui partisipasi sinergi dan komprehensif dari semua komponen bangsa dan negara. Kehadiran sistem demokrasi membutuhkan dukungan nyata dari seluruh masyarakat. Pada pemilihan umum, partisipasi masyarakat (tingkat kehadiran masyarakat dan tingkat mencoblos atau memilih) merupakan titik krusial yang harus terus menerus diperjuangkan. Mencerdaskan masyarakat dalam memilih dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kontestan yang ikut serta, visi dan misi kontestan, program dan kegiatan KPU dan sebagainya.

Dalam organisasi privat dikenal adanya promosi dan pemasaran, sehingga produk organisasi privat dikenal dan akhirnya pelanggan membeli produk tersebut. Pada organisasi publik (termasuk KPU), keberadaan promosi dan pemasaran dapat diibaratkan bahwa program dan kegiatannya dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program dan kegiatan KPU adalah produk dari jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2014. Mensosialisasi program dan kegiatan pemilihan umum telah ditetapkan norma perundangan. Namun demikian, selayaknya mendesain alat peraga dan komunikasi interaktif dengan media massa dan media elektronik masih memungkinkan dilaksanakan. Profesionalitas penyelenggara pemilu menjadi bagian penting dalam menunjang keberhasilan pemilu itu sendiri. Pada era digitalisasi atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah wajar bila mendesain promosi dan pemasaran kegiatan KPU merupakan kebutuhan organisasi KPU. Hampir dapat dipastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kehidupan manusia semakin berkualitas. Perlu dipikirkan bahwa tata kelola penyelenggaraan pemilihan umum dirancang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Media elektronik dan media sosial dapat

digunakan mempermudah dan memperlancar sosialisasi dan komunikasi sinergis dan komprehensif dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Keberhasilan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dukungan dari semua komponen bangsa dan negara. Keterlibatan atau partisipasi semua komponen mempermudah dan mempercepat terwujudnya visi dan misi pemerintahan. Perbaikan kualitas kehidupan masyarakat melalui optimalisasi program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan merupakan tujuan berdirinya suatu pemerintahan. Memberdayakan masyarakat melalui meningkatkan peran serta dan dukungan dalam proses, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pemerintahan adalah strategi penguatan sumber daya daerah/nasional. Partisipasi masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan daerah menjadi indikator keberhasilan mewujudkan kebutuhan masyarakat. Meningkatkan kualitas dan kuantitas peran serta dan dukungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendidikan bagi masyarakat. Dalam ruang lingkup mensejahterakan masyarakat, pendidikan formal atau informal memberikan nilai tambah kepada masyarakat dalam mengelola kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan kehidupan lainnya. Pendidikan politik menjadi kebutuhan masyarakat sehingga melekat arti dan kegunaan keberadaan partai politik, melekat arti dan kegunaan pemilihan langsung, melekat arti dan kegunaan visi dan misi konstituan dan lainnya. Memberdayakan masyarakat dalam dinamika kehidupan demokrasi memberikan nilai tambah atas pendidikan politik yang dilakukan suprastruktur politik ataupun infrastruktur politik. Pendidikan politik perlu dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak apriori atau takut dalam kegiatan politik.

Seperti kata para ahli politik bahwa politik memiliki makna dan arti sebagai sarana atau alat mensejahterakan masyarakat melalui optimalisasi tugas dan fungsi lembaga politik (legislatif, eksekutif, yudikatif dan sebagainya). Komunikasi sinergis dan komprehensif yang dilakukan pemangku kepentingan politik memberikan kemudahan transfer pemahaman dan pengertian arti dan makna pendidikan politik itu. Mensejahterakan masyarakat adalah asas utama melakukan berbagai program dan kegiatan politik. Memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum terlihat dari kehadiran masyarakat dalam pesta demokrasi dan kegiatan mencoblos dalam bilik tempat pemungutan suara (TPS). Penyelenggara pemilihan umum (KPU) memiliki tugas dan fungsi mencerdaskan masyarakat dalam memahami dan mengerti subjek dan objek pemilihan umum, mekanisme dan prosedural pemilihan umum dan kemanfaatan pemilihan itu sendiri. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum merupakan modal besar dalam keberhasilan penerapan sistem demokrasi dalam pemerintahan. Mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat tidak hanya menjadi tugas dan fungsi dari suprastruktur (trias politik sebagai contohnya) dan juga menjadi tugas dan fungsi dari infrastruktur (masyarakat madani, partai politik, kelompok profesi, kelompok kepentingan dan sebagainya). Sinergitas dan komprehensif kegiatan para pemangku kepentingan politik akan menghasilkan pemahaman dan pengertian masyarakat semakin meningkat.

Pemahaman dan pengertian masyarakat memberikan sumbangan yang besar terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan, berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan (memiliki kedudukan dalam lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya). Kecerdasan pemikiran, daya kreasi dan umpan balik atas informasi penyelenggaraan pemilihan umum. Perilaku politik atau tingkah laku politik yang

diperankan masyarakat berhubungan tingkatan pemahaman dan pengertian anggota masyarakat (individu).

Membangun komunikasi sinergis dan komprehensif diartikan bahwa pembina hubungan antara pemilih dengan konstestan dan hubungan politik lainnya. Kehadiran konstestan secara berkala memberikan keyakinan atau kepercayaan kepada pemilih bahwa pilihannya adalah sesuai dengan kriteria yang dimiliki pemilih. Membangun komunikasi menjadi sarana pendekat yang dapat dilakukan konstestan sehingga terbangun nilai emosional dan nilai rasionalitas dari diri pemilih. Memang diakui bahwa membangun komunikasi sinergis tidak dapat sekali jadi namun dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Keberdayaan pemilih menjadi modal penting bagi keberhasilan pembangunan sistem demokrasi dalam pemerintahan.

Mengadakan pertemuan secara berkala, menyampaikan visi dan misi secara lengkap dan jelas, mendengar atau menyerap aspirasi dan tuntutan serta kebutuhan pemilih adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan konstestan. Kegiatan lain yang dapat dilakukan adalah memberikan sosialisasi tugas dan fungsi dari lembaga perwakilan rakyat. Mengelola hubungan sinergis dan komprehensif antara pemilih dan konstestan adalah pekerjaan politik yang maha berat karena membutuhkan waktu yang lama, dana yang besar, perhatian yang serius, konsisten dan komitmen pada visi dan misi, responsivitas atau daya kepekaan atas permasalahan masyarakat pemilih dan sebagainya.

Pola komunikasi antara pemilih dengan konstestan sejatinya adalah dua arah sehingga masukan dan saran menjadi bagian integral dari keberdayaan hubungan politik yang terbina. Manajemen pengelolaan informasi dan komunikasi antara pemilih dan konstestan (konstituen dengan konstestan) memberikan nilai tambah dalam hubungan sinergis yang terjadi. Konstituen dapat memberikan sumbangan saran pemikiran atas ide dan pemikiran konstestan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi atau kinerja konstestan menjadi menguat dan berkualitas. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pekerjaan politik konstestan memberikan keyakinan dan kepercayaan pemilih (konstituen) bahwa mereka telah melakukan pilihan yang benar dan tepat.

Keberhasilan pemilihan umum memiliki dampak yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintahan mengikuti sistem pemerintahan yang diamanatkan norma peraturan yang berlaku. Pemilihan umum merupakan instrumen penting dari penerapan sistem pemerintahan yang berdasarkan sistem demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berdasarkan sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi dikenal bahwa suara rakyat adalah suara yang menentukan keberlangsungan pemerintahan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum memberikan gambaran bahwa masyarakat terlibat dalam proses demokratisasi yang terjadi dalam kehidupan demokrasi dalam suatu pemerintahan atau suatu negara. Partisipasi masyarakat memberikan energi yang besar bagi peningkatan kepercayaan masyarakat atas legitimasi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu adalah wajar dan pantas bila partisipasi masyarakat menjadi pusat perhatian para pemangku keberhasilan demokrasi.

Kepercayaan masyarakat adalah produk dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Mengoptimalkan komunikasi dan sosialisasi baik yang dilakukan pemerintah,

masyarakat maupun dunia usaha mendorong terciptanya suatu modal politik yang kuat dan sinergis. Modal politik tersebut dapat memperkuat rasa memiliki bangsa dan negara sebagai wadah mewujudkan pemenuhan aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Meningkatkan peran serta masyarakat madani seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh budaya, kelompok kepentingan, dan sebagainya menjadi modal sosial dan modal politik dalam memperkuat sistem check and balancing dalam hubungan pemerintahan dengan masyarakat. Keberadaan masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berlaku menjadi rumah kebangsaan kita bersama. Keberhasilan pemerintahan mewujudkan program dan kegiatannya adalah indikator keberhasilan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan norma perundangan. Seperti kata orang bijak bahwa politik adalah wadah atau sarana mensejahterakan masyarakat, maka sistem politik yang demokratis diharapkan menjadi pembenar dari slogan tersebut diatas.

Dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum terkadang memberikan gambaran begitu jauhnya politik dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan peran serta konstestan pemilihan umum (baik peserta pemilih maupun kandidat calon partai) diharapkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum menjadi indikator menghasilkan kepemimpinan nasional, pemimpin daerah dan perwujudan pemerintahan yang berkualitas. Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan tanggungjawab semua pihak yang ada. Keberhasilan pemilihan umum akan terlihat dari keberhasilan pemerintahan dan pembangunan menjalankan visi dan misi daerah sebagaimana diamanatkan peraturan daerah. Keberadaan pemilihan umum berhubungan dengan kehadiran anggota perwakilan rakyat sesuai dengan norma perundangan yang berlaku.

Terpilihnya anggota perwakilan rakyat menjadi sarana mensejahterakan masyarakat melalui optimalisasi tugas dan fungsi lembaga perwakilan yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi buggeting. Ketiga fungsi lembaga perwakilan itu akan mensinergis dengan tugas dan fungsi pemerintahan. Sinergitas dan komprehensivitas fungsi lembaga perwakilan rakyat (produk dari pemilihan umum anggota partai politik) dan fungsi pemerintahan (produk dari pemilihan umum kepala daerah) akan berjuang dan bekerja sama mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui optimalisasi fungsi kedua lembaga itu.

Efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi kedua lembaga itu merupakan indikator keberhasilan penyelenggaraan sistem demokrasi dalam pemerintahan (baik pusat maupun daerah). Operasionalisasi tugas dan fungsi lembaga pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat menjadi wadah mengoperasionalkan program dan kegiatan pembangunan yang telah disusun berdasarkan musyawarah pembangunan (baik tingkatan pusat maupun tingkatan daerah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat memilih di Kabupaten Toba Samosir yang ditandai dengan nilai t_{hitung} untuk variabel partisipasi yang lebih besar dibandingkan dengan Nilai t_{hitung} untuk variabel Sosialisasi

- (6,345) lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} (2,92) atau nilai sig (0,000) lebih kecil dari alpha (0,025). Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,448 atau 44,8 % yang menunjukkan kemampuan sosialisasi dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Tobasa sebesar 44,8%, sedangkan sisanya sebesar 55,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model misalnya pendidikan masyarakat, program pemerintah, dan lain-lain.
2. Fungsi Sosialisasi sebagai fasilitator, motivator dan sebagai pendukung gerak usaha Komisi Pemilihan Umum merupakan titik sentral dalam memberikan partisipasi memilih kepada masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum memperhatikan pembangunan Kabupaten Toba Samosir kedepan.
 3. Proses penyelenggaraan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan benar apabila didukung dengan tenaga sosialisasi yang profesional, kelembagaan penyuluh yang handal, materi penyuluhan yang terus-menerus mengalir, sistem penyelenggaraan sosialisasi yang benar serta metode sosialisasi yang tepat kepada masyarakat. Dengan demikian sosialisasi pemilihan kepala daerah sangat penting artinya dalam memberikan modal bagi pembangunan untuk mencapai tujuan dalam memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat kabupaten toba samosir.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan Bisri A. Zaini., 2006. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, jakarta
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.
- Bintan R. Saragih, 1987. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Budiarjo, Miriam., 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Buku laporan penyelenggaraan pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di
- Ginting, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Pemilihan Pemula Pada Pemilihan Umum Serentak Di Jakarta Timur Tahun 2019 (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia). kabupaten Toba Samosir, hlm 63.).
- Karten, D. C. dan Syahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nazir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nizar, A., Siregar, R. T., Damanik, S. E., & Purba, E. (2019). Pengaruh Ketersediaan Prasarana Dan Sarana Utilitas Umum (PSU) Terhadap Harga Jual Perumahan Dalam Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Regional Planning*, 1(2), 108-121
- Noviani, L., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Analisis Faktor Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019. *PERSPEKTIF*, 10(1), 88-99.

- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251-272.
- Purba, R. T., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2019). Dampak Relokasi Pusat Pemerintahan Terhadap Efisiensi Pelayanan Masyarakat Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 54 –. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.579>
- Sihotang, C. H. P., Silalahi, M., Siregar, R. T., & Marbun, J. (2019). Pengaruh Persepsi, Perilaku, Dan Sosial Budaya Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Diklat Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun . *Jurnal Regional Planning*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.36985/jrp.v1i1.575>
- Sugiyono, 2004. *Methodo Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta,
- Tarigan, W. J., & Sinaga, M. H. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Untuk Mengevaluasi Perencanaan Strategis Dengan Menggunakan Balance Scorecard. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1194-1207
- Thoha, Miftah. 2006. *Birokrasi dan Politik Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Undang - Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.